

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi sosial dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan modern, keberhasilan pembangunan tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi melainkan juga dipahami sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang mencakup transformasi struktur sosial serta perubahan kelembagaan, kelembagaan, nilai serta peningkatan kapasitas manusia dan keberlanjutan lingkungan (Seers, 1969; Todaro, 2000; Szirmai, 2005). Namun demikian berbagai pengalaman pembangunan di negara berkembang menunjukkan bahwa capaian pembangunan sering kali bersifat tidak merata dan meninggalkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi rentan secara sosial, ekonomi dan ekologis (Damsar & Indriani, 2016).

Salah satu kelompok yang paling merasakan ketimpangan hasil pembangunan adalah masyarakat adat khususnya yang tersebar di wilayah pedesaan serta bergantung pada sumber daya alam. Meskipun memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem serta pelestarian keanekaragaman hayati, komunitas adat seringkali berada pada posisi marginal dalam proses pembangunan akibat keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi, layanan sosial dan lemahnya daya tawar dalam kebijakan pembangunan (FAO, 2021; UNESCO, 2020; World Bank, 2022). Dalam konteks di Indonesia kondisi tersebut tercermin pada keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hingga kini masih menghadapi persoalan kemiskinan struktural, keterisolasian wilayah dan kerentanan penghidupan.

Sektor pertanian selama ini diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan pedesaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Sektor pertanian menempati posisi strategis sebagai penopang ketersediaan pangan, penggerak penciptaan lapangan kerja serta instrumen peningkatan pendapatan masyarakat serta pemeliharaan keberlanjutan sumber daya alam (Mosher, 1966; Rogers, 1976; FAO, 2020; World Bank, 2023). Dalam perkembangannya pembangunan pertanian tidak

hanya dimaknai sebagai peningkatan produksi dan produktivitas tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang mencakup perubahan perilaku, kelembagaan, kapasitas manusia dan sistem penghidupan masyarakat (Patra, 2014; Dumasari, 2020). Namun penerapan pembangunan pertanian pada komunitas masyarakat adat menghadapi tantangan yang kompleks karena transformasi penghidupan dari ketergantungan terhadap sumber daya hutan menuju penghidupan berbasis pertanian tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral melainkan berinteraksi dengan sistem nilai lokal, pengetahuan tradisional, struktur sosial serta konteks kerentanan seperti konflik lahan, perubahan kebijakan pengelolaan hutan, ekspansi perkebunan skala besar dan dinamika pasar komoditas. Kondisi ini menunjukkan pembangunan pertanian sebagai intervensi penghidupan tidak dapat diasumsikan bahwa akan secara otomatis menghasilkan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup bagi komunitas masyarakat adat.

Meskipun pembangunan pertanian diposisikan sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan namun dalam praktiknya intervensi pembangunan pertanian tidak selalu menghasilkan keberlanjutan penghidupan khususnya pada komunitas masyarakat adat. Berbagai program yang berfokus pada penyediaan aset fisik seperti lahan, sarana produksi dan infrastruktur seringkali tidak diikuti oleh penguatan kapasitas manusia, kelembagaan sosial dan akses ekonomi sehingga menghasilkan capaian yang bersifat parsial dan jangka pendek.

Dalam konteks masyarakat adat fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pendekatan pembangunan pertanian yang bersifat sektoral dengan realitas penghidupan masyarakat adat yang bersifat multidimensional. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata menekankan pada peningkatan produksi melainkan juga terhadap pemahaman pada dinamika aset penghidupan, strategi adaptasi serta konteks kerentanan yang mempengaruhi keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Dalam kebijakan nasional di Indonesia, komunitas masyarakat adat dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menjadi sasaran berbagai program pemberdayaan sosial. Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa jumlah KAT berjumlah 1,2 juta jiwa yang tersebar di berbagai lokasi pada berbagai Provinsi (Kemensos RI, 2023). Pemberdayaan KAT diarahkan untuk

meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kualitas hidup melalui pendekatan terpadu yang mencakup penguatan manusia, penghidupan dan lingkungan (Bappenas, 2020; Kemensos, 2021). Salah satu bentuk intervensi utama dalam program pemberdayaan tersebut adalah pembangunan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), komunitas adat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan tingkat keterpencilan, akses terhadap pelayanan sosial dasar serta tingkat integrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas. KAT 1 umumnya merupakan komunitas yang masih sangat terisolasi dengan akses yang sangat terbatas terhadap layanan dasar dan infrastruktur. KAT 2 menunjukkan tingkat keterbukaan yang lebih baik namun masih menghadapi keterbatasan dalam akses dan kapasitas penghidupan. Sementara KAT 3 merupakan kelompok yang telah mengalami intervensi pemberdayaan dan mulai berinteraksi dengan sistem sosial ekonomi di luar komunitasnya namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian penghidupan secara berkelanjutan.

Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang menjadi fokus dalam penelitian ini termasuk dalam kategori KAT 3 yaitu kelompok yang telah memperoleh berbagai program pemberdayaan khususnya melalui intervensi pembangunan pertanian dan pendampingan sosial. Pemilihan KAT 3 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini berada pada fase transisi yang krusial yaitu dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian penghidupan. Pada tahap ini efektivitas intervensi pemberdayaan, termasuk penguatan aset penghidupan dan kualitas pendampingan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transformasi penghidupan masyarakat adat. Dengan demikian kajian terhadap KAT 3 menjadi penting karena tidak hanya menggambarkan kondisi penghidupan masyarakat adat tetapi juga memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan serta memberikan dasar untuk merumuskan model pemberdayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

SAD di Provinsi Jambi merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang menjadi fokus kebijakan pemberdayaan berbasis pembangunan pertanian. SAD yang dikenal juga sebagai Orang Rimbo secara historis menggantungkan penghidupan pada

hutan melalui aktivitas berburu, meramu dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Namun lebih dari dua dekade terakhir, perubahan tata guna lahan ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kebijakan pengelolaan hutan telah secara signifikan mengurangi ruang hidup dan sumber penghidupan SAD. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengarahkan transformasi mata pencaharian SAD menuju penghidupan yang lebih menetap dan produktif melalui program pembangunan pertanian (Pemerintah Provinsi Jambi, 2020).

Sejak tahun 2010 di Kabupaten Tebo dan sejak tahun 2014 di Kabupaten Bungo berbagai program pemberdayaan berbasis pertanian telah dilaksanakan terhadap komunitas SAD. Intervensi tersebut meliputi penyediaan lahan pertanian, bantuan sarana dan prasarana produksi, bibit tanaman pangan dan perkebunan, pengembangan usaha perikanan dan peternakan serta pendampingan sosial oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara normatif intervensi ini diharapkan mampu memperkuat aset penghidupan SAD, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki akses pangan serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun hasil pelaksanaan program pemberdayaan tersebut menunjukkan capaian yang tidak seragam antar wilayah. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa komunitas SAD di Kabupaten Bungo menunjukkan tingkat transformasi penghidupan yang relatif lebih maju dibandingkan dengan komunitas SAD di Kabupaten Tebo. SAD di Kabupaten Bungo telah mengembangkan penghidupan berbasis pertanian komersial khususnya perkebunan kelapa sawit serta menunjukkan pola hidup yang lebih menetap dan terintegrasi dengan ekonomi lokal. Sebaliknya di Kabupaten Tebo sebagian besar mayoritas SAD masih menggantungkan penghidupan pada hasil hutan dan menunjukkan keterbatasan dalam mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Perbedaan ini terjadi meskipun kedua wilayah sama-sama menjadi sasaran program pemberdayaan berbasis pertanian.

Variasi capaian tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian pada komunitas masyarakat adat tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan bantuan fisik atau akses terhadap lahan. Faktor lain seperti pola pendampingan, penguatan kapasitas manusia, jaringan sosial serta kemampuan adaptasi rumah tangga dalam merespon konteks kerentanan diduga memainkan peran penting dalam menentukan keberlanjutan penghidupan. Di Kabupaten Bungo, pendampingan

SAD dilakukan oleh LSM Pundi Sumatra dengan pola insitu dan di Kabupaten Tebo pendampingan dilakukan oleh LSM Orik (Orang Rimbo Kito) dengan pola eksitu. Perbedaan pola pendampingan ini berpotensi mempengaruhi cara rumah tangga SAD mengakses, mengelola dan memanfaatkan aset penghidupan yang dimiliki.

Selain faktor pendampingan bahwa penghidupan SAD juga dipengaruhi oleh berbagai konteks kerentanan. Konflik lahan dengan perusahaan perkebunan membatasi akses pada sumber daya alam dan lahan pertanian. Disisi lain fluktuasi harga kelapa sawit dan adanya kebijakan alih fungsi lahan oleh pemerintah menjadi faktor struktural yang mempengaruhi stabilitas penghidupan rumah tangga SAD. Konteks kerentanan tersebut berinteraksi secara langsung dengan struktur aset penghidupan dan strategi mata pencaharian yang dikembangkan oleh komunitas SAD.

Pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika tersebut. SLF memandang penghidupan sebagai hasil interaksi antara lima modal penghidupan yaitu modal manusia, modal sumber daya alam, modal sosial, modal fisik dan modal finansial yang dipengaruhi oleh konteks kerentanan dan membentuk strategi mata pencaharian rumah tangga (Chambers & Conway, 1992; DFID, 1999; Ellis, 2000). Melalui pendekatan ini keberhasilan pembangunan pertanian tidak diukur semata-mata dari peningkatan produksi atau distribusi aset tetapi dari kemampuannya dalam memperkuat keseluruhan struktur aset penghidupan dan menghasilkan capaian penghidupan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka SLF hubungan antar komponen penghidupan bersifat sistemik dan saling mempengaruhi. Konteks kerentanan yang meliputi tekanan struktural, kebijakan, konflik sumber daya serta dinamika pasar berperan dalam menentukan tingkat akses dan kontrol rumah tangga terhadap modal penghidupan. Modal penghidupan yang terdiri dari modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal sumber daya alam dan modal finansial selanjutnya menjadi dasar bagi rumah tangga dalam merumuskan strategi mata pencaharian. Rumah tangga dengan kepemilikan aset yang lebih baik dan seimbang cenderung mempunyai kemampuan yang adaptif untuk mengembangkan strategi penghidupan. Selanjutnya strategi penghidupan yang dipilih akan menentukan capaian penghidupan (*livelihood outcomes*) yang meliputi peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan yang bermuara pada keberlanjutan

penghidupan. Hubungan ini tidak bersifat linear melainkan dinamis, dimana capaian penghidupan yang dihasilkan dapat memberikan umpan balik terhadap penguatan atau pelemahan aset penghidupan rumah tangga. Dengan demikian keberlanjutan penghidupan ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara konteks kerentanan, aset, strategi dan capaian penghidupan.

Meskipun SLF telah banyak digunakan dalam studi kemiskinan dan pembangunan pedesaan namun penerapannya dalam konteks pembangunan pertanian pada komunitas masyarakat adat masih relatif terbatas. Sebagian besar evaluasi program pemberdayaan terhadap SAD cenderung berfokus pada output administratif dan capaian jangka pendek tanpa mengkaji secara mendalam perubahan struktur aset penghidupan, strategi mata pencaharian serta implikasinya terhadap keberlanjutan penghidupan pasca intervensi. Selain itu kajian komparatif yang menganalisis perbedaan capaian penghidupan antar wilayah dengan karakter pendampingan yang berbeda masih sangat terbatas.

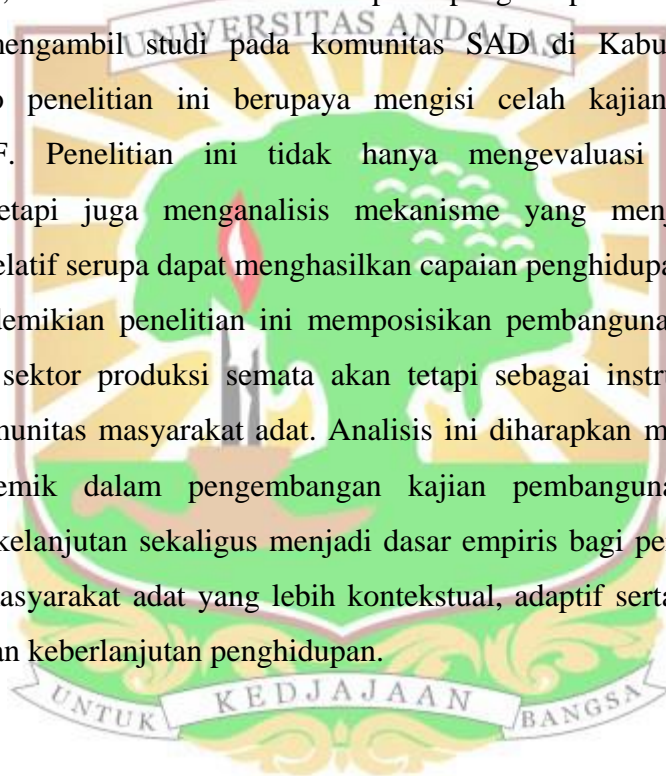
Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat adat sangat ditentukan oleh keseimbangan dan keterkaitan antar aset penghidupan serta kemampuan komunitas dalam mengelola perubahan (Beaudoin *et al.*, 2015; Giovannini, 2016; Hunt & Campbell, 2016; Barnabe, 2021). Namun sebagian besar kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan pembangunan pertanian sebagai titik masuk analisis penghidupan pada komunitas adat terpencil khususnya dalam konteks perbandingan antar wilayah dengan karakter pendampingan yang berbeda. Dengan demikian masih terdapat celah kajian mengenai bagaimana pembangunan pertanian melalui mekanisme penguatan aset penghidupan membentuk strategi mata pencaharian dan capaian penghidupan masyarakat adat pasca intervensi pemberdayaan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai evaluasi kebijakan pemberdayaan tetapi sebagai upaya untuk memahami mekanisme sosial-ekonomi yang menjelaskan keberlanjutan penghidupan komunitas masyarakat adat dalam konteks pembangunan pertanian. Dengan mengintegrasikan analisis implementasi pemberdayaan, perubahan aset penghidupan, strategi mata pencaharian dalam kerangka SLF penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

lebih komprehensif mengenai faktor penentu keberhasilan transformasi sistem penghidupan SAD. Pemahaman ini menjadi krusial bagi pengembangan ilmu pertanian yang lebih sensitif terhadap konteks sosial budaya sekaligus bagi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat yang berorientasi pada keberlanjutan penghidupan jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat kebutuhan akan kajian yang menempatkan pembangunan pertanian sebagai intervensi penghidupan dan menganalisis secara komprehensif terkait implementasi pemberdayaan, perubahan aset penghidupan, strategi mata pencaharian, konteks kerentanan serta capaian penghidupan komunitas masyarakat adat. Dengan mengambil studi pada komunitas SAD di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo penelitian ini berupaya mengisi celah kajian tersebut melalui pendekatan SLF. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi capaian program pemberdayaan tetapi juga menganalisis mekanisme yang menjelaskan mengapa intervensi yang relatif serupa dapat menghasilkan capaian penghidupan yang berbeda.

Dengan demikian penelitian ini memosisikan pembangunan pertanian bukan sekadar sebagai sektor produksi semata akan tetapi sebagai instrumen transformasi penghidupan komunitas masyarakat adat. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pembangunan pertanian dan penghidupan berkelanjutan sekaligus menjadi dasar empiris bagi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat yang lebih kontekstual, adaptif serta berorientasi pada penguatan aset dan keberlanjutan penghidupan.



1.2. Rumusan Masalah

Perubahan lanskap sosial, ekonomi dan ekologis di wilayah pedesaan Indonesia dalam kurun dua dekade terakhir telah membawa implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat adat. Ekspansi perkebunan skala besar, alih fungsi lahan hutan, pembangunan infrastruktur serta dinamika kebijakan pengelolaan sumber daya alam telah membatasi ruang hidup dan sumber penghidupan komunitas masyarakat adat yang secara historis bergantung pada hutan dan ekosistem sekitarnya.

Dalam konteks tersebut komunitas adat terpencil berada pada posisi yang paling rentan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi, layanan sosial dan lemahnya posisi tawar dalam proses pembangunan.

Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi merupakan komunitas masyarakat adat yang mengalami tekanan paling intensif akibat perubahan tata guna lahan dan kebijakan pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam. Ketergantungan SAD terhadap hutan sebagai sumber pangan utama, obat-obatan dan penghidupan menjadikan perubahan fungsi hutan berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan mereka. Berkurangnya akses terhadap hutan tidak hanya menurunkan ketersediaan pangan, tetapi juga memicu perubahan pola mata pencaharian, relasi sosial serta struktur ekonomi rumah tangga SAD. Kondisi ini menempatkan SAD dalam konteks kerentanan yang tinggi dan berlapis, baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut pemerintah melalui berbagai kebijakan telah melaksanakan program pemberdayaan sosial dengan pembangunan pertanian sebagai instrumen utama transformasi mata pencaharian terhadap komunitas adat terpencil sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015. Sejak tahun 2010 program pemberdayaan terhadap SAD di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo diarahkan pada transformasi mata pencaharian dari ketergantungan terhadap hutan menuju penghidupan berbasis pertanian dan kegiatan ekonomi produktif lainnya (peta perubahan lahan pada dua wilayah studi pada lampiran 2 dan lampiran 3). Intervensi yang dilakukan meliputi penyediaan lahan pertanian, bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengembangan usaha perikanan dan peternakan serta pendampingan sosial oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Meskipun program pemberdayaan berbasis pertanian tersebut telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif panjang akan tetapi hingga saat ini belum terdapat pemahaman yang komprehensif mengenai sejauhmana intervensi tersebut mampu memperkuat aset penghidupan SAD dan mendukung keberlanjutan mata pencaharian mereka. Evaluasi program yang dilakukan selama ini cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada output seperti jumlah bantuan yang disalurkan atau jumlah penerima program tanpa mengkaji secara mendalam perubahan struktur aset

penghidupan rumah tangga SAD serta dinamika strategi mata pencaharian yang berkembang pasca intervensi. Akibatnya efektivitas program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan penghidupan SAD masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara ilmiah.

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa intervensi pemberdayaan selama ini lebih banyak menitikberatkan pada penyediaan aset fisik seperti rumah hunian dan sarana produksi dengan asumsi bahwa peningkatan akses terhadap faktor produksi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan rumah tangga SAD. Pendekatan tersebut kurang mempertimbangkan keterkaitan antar modal penghidupan khususnya modal manusia, modal finansial dan modal sosial yang memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan rumah tangga mengelola dan memanfaatkan aset fisik secara berkelanjutan. Ketimpangan antar komponen aset penghidupan berpotensi menyebabkan program pemberdayaan tidak menghasilkan dampak jangka panjang meskipun secara kasatmata terjadi peningkatan aset fisik.

Selain itu pelaksanaan program pemberdayaan terhadap SAD berlangsung dalam konteks kerentanan yang dinamis dan kompleks. Konflik lahan antara komunitas SAD dengan pihak perusahaan atau masyarakat sekitar turut memperlemah akses terhadap lahan pertanian dan sumber daya alam. Disisi lain adanya kebijakan alih fungsi lahan dan fluktuasi harga komoditas pertanian khususnya komoditi kelapa sawit menjadi faktor perubahan jangka panjang dan musiman yang mempengaruhi stabilitas penghidupan rumah tangga SAD. Konteks kerentanan tersebut berinteraksi secara langsung dengan kepemilikan dan akses aset penghidupan namun belum banyak dikaji secara sistematis dalam kerangka evaluasi pemberdayaan komunitas masyarakat adat.

Perbedaan karakteristik sosial, tekanan ekologis serta dinamika kebijakan antara Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo juga menimbulkan variasi dalam implementasi dan capaian program pemberdayaan. Meskipun kedua wilayah tersebut sama-sama menjadi lokasi pelaksanaan program pemberdayaan berbasis pertanian, perbedaan aktor pendamping, kondisi geografis serta intensitas tekanan alih fungsi lahan berpotensi menghasilkan capaian penghidupan yang berbeda. Meskipun demikian sampai dengan saat ini belum tersedia kajian komparatif yang menganalisis perbedaan tersebut dalam

kerangka penghidupan berkelanjutan sehingga pembelajaran kebijakan yang dihasilkan masih terbatas.

Dalam kajian pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami hubungan antara aset penghidupan, konteks kerentanan, strategi mata pencaharian dan capaian penghidupan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan penghidupan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aset akan tetapi oleh kemampuan rumah tangga dalam mengelola aset tersebut, beradaptasi terhadap perubahan serta memanfaatkan peluang yang tersedia namun penerapan SLF dalam konteks komunitas masyarakat adat khususnya yang menjadi sasaran intervensi pembangunan pertanian masih relatif terbatas baik secara konseptual maupun empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat kesenjangan kajian yang signifikan terkait pemahaman mengenai dinamika penghidupan SAD pasca intervensi pemberdayaan pertanian. Secara khusus belum diketahui secara jelas bagaimana implementasi program pemberdayaan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM mempengaruhi perubahan aset penghidupan SAD; bagaimana rumah tangga SAD merespons perubahan tersebut melalui strategi mata pencaharian yang beragam; serta sejauh mana strategi yang dipilih mampu menghasilkan capaian penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karenanya diperlukan kajian yang tidak hanya mengevaluasi program pemberdayaan dari sisi output tetapi juga menganalisis secara mendalam struktur dan dinamika aset penghidupan, strategi mata pencaharian serta capaian penghidupan rumah tangga SAD dalam konteks perubahan social ekologis yang kompleks. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat adat tidak bersifat parsial dan jangka pendek melainkan mampu mendukung transformasi penghidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) kategori 3, karena kelompok ini berada pada fase transisi yang menentukan yaitu dari ketergantungan menuju kemandirian penghidupan. Pada fase ini efektivitas intervensi pemberdayaan khususnya dalam penguatan aset penghidupan dan kualitas pendampingan menjadi sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan penghidupan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung penghidupan SAD di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana perubahan aset penghidupan rumah tangga SAD yang meliputi modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal sumber daya alam (*natural capital*), modal fisik (*physical capital*) dan modal finansial (*financial capital*) pasca intervensi pemberdayaan?
3. Bagaimana strategi penghidupan (*livelihood strategies*) yang dikembangkan rumah tangga SAD?
4. Bagaimana capaian penghidupan (*livelihood outcomes*) yang dihasilkan sebagai implikasi dari strategi penghidupan yang dipilih dalam mendukung keberlanjutan penghidupan rumah tangga SAD?
5. Bagaimana model pemberdayaan penghidupan komunitas SAD sebagai upaya meningkatkan keberlanjutan penghidupan masyarakat adat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan dan program pemberdayaan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendukung keberlanjutan penghidupan SAD di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
2. Menganalisis perubahan aset penghidupan SAD yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal sumber daya alam, modal fisik dan modal finansial pasca intervensi pemberdayaan.
3. Mengkaji strategi penghidupan (*livelihood strategies*) yang dilakukan SAD dalam merespons perubahan aset dalam dinamika kebijakan pemberdayaan.
4. Mengidentifikasi capaian penghidupan (*livelihood outcomes*) yang dihasilkan sebagai implikasi dari strategi penghidupan yang dipilih SAD pasca intervensi pemberdayaan.

5. Menghasilkan model pemberdayaan penghidupan komunitas SAD untuk mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat adat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain :

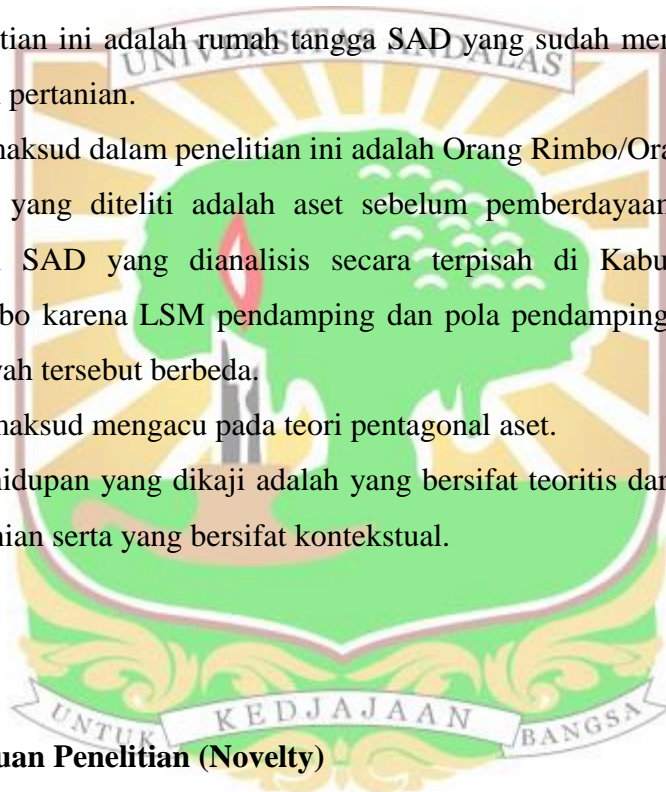
1. Manfaat akademik (teoretis) yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pembangunan pertanian dan studi penghidupan berkelanjutan melalui pengayaan kajian teoritis dan temuan empiris terkait dinamika *livelihood* SAD. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan konsep *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) pada komunitas masyarakat adat serta memperkaya pemahaman mengenai peran aset penghidupan dalam mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat adat. Selain itu pendekatan komparatif antara dua wilayah penelitian memberikan kontribusi dalam memperkuat validitas konseptual model sehingga dapat diaplikasikan pada konteks komunitas adat dengan tingkat keterpencilan yang berbeda.
2. Manfaat praktis (kebijakan dan pembangunan) yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat adat/Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pada KAT 1 hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merancang intervensi awal yang berfokus pada pembukaan akses terhadap layanan dasar, penguatan kapasitas dasar, serta pengenalan sistem penghidupan yang lebih adaptif. Pada KAT 2 penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan proses transisi menuju kemandirian melalui pengembangan aset penghidupan secara bertahap, serta peningkatan kapasitas dalam mengelola sumber daya secara produktif. Sementara pada KAT 3 hasil penelitian ini secara langsung relevan dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih integratif, melalui optimalisasi lima modal penghidupan dan penguatan kualitas pendampingan, guna mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat adat secara jangka panjang.
3. Manfaat bagi pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan

pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan khususnya dalam konteks keterkaitan antara pengelolaan hutan, mata pencaharian masyarakat adat dan perlindungan ruang hidup SAD. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemberdayaan berbasis *sustainable livelihood* yang efektif sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup yang diteliti guna memberi batasan pada penelitian, ruang lingkup penelitian ini yaitu :

1. Subyek penelitian ini adalah rumah tangga SAD yang sudah mendapatkan program pemberdayaan pertanian.
2. SAD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Orang Rimbo/Orang Rimba
3. Variabel aset yang diteliti adalah aset sebelum pemberdayaan dan aset setelah pemberdayaan SAD yang dianalisis secara terpisah di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo karena LSM pendamping dan pola pendampingan yang dilakukan di kedua wilayah tersebut berbeda.
4. Aset yang dimaksud mengacu pada teori pentagonal aset.
5. Strategi penghidupan yang dikaji adalah yang bersifat teoritis dari sumber pertanian dan non pertanian serta yang bersifat kontekstual.



1.6. Kebaharuan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusi teoretis, konseptual dan empiris dalam pengembangan ilmu pertanian khususnya dalam kajian pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan penghidupan komunitas masyarakat adat pasca intervensi pemberdayaan. Secara teoretis penelitian ini tidak hanya mengadopsi *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) tetapi memperluas dan mereposisi kerangka tersebut dalam konteks pembangunan pertanian sebagai intervensi penghidupan pada komunitas masyarakat adat. Penelitian ini menempatkan pembangunan pertanian bukan semata sebagai upaya peningkatan produksi melainkan sebagai proses transformasi

yang membentuk struktur aset penghidupan, strategi mata pencaharian dan capaian keberlanjutan penghidupan secara dinamis.

Secara konseptual kebaruan utama penelitian ini terletak pada perumusan model Pemberdayaan yaitu model PILMA (Pemberdayaan Intensif Lima Modal) sebagai pengembangan dari SLF. Berbeda dengan SLF yang cenderung bersifat analitis deskriptif, model yang dirumuskan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan operasional dengan menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat adat ditentukan oleh kepemilikan dan keseimbangan lima modal penghidupan (modal manusia, modal sosial, modal sumber daya alam, modal fisik dan modal finansial) dengan pendampingan yang lebih baik, berperan sebagai faktor kunci dalam mengoptimalkan fungsi setiap modal penghidupan.

Penelitian ini menemukan bahwa pendampingan bukan sekedar faktor eksternal melainkan merupakan determinan utama yang memediasi hubungan antara aset penghidupan dan strategi mata pencaharian. Intensitas dan pola pendampingan serta keberlanjutan program menentukan sejauhmana rumah tangga mampu mengakses, mengelola dan mentransformasikan aset penghidupan menjadi strategi yang adaptif dan produktif. Dengan demikian model PILMA menegaskan bahwa intervensi pemberdayaan yang hanya berfokus pada penyediaan aset fisik tanpa didukung oleh pendampingan yang berkualitas akan menghasilkan capaian penghidupan yang parsial dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pemberdayaan penghidupan berbasis integrasi lima modal dengan intensitas dan pola pendampingan yang tidak hanya memperkaya pendekatan SLF tetapi juga menggeser paradigma pembangunan pertanian dari pendekatan sektoral berbasis bantuan fisik menuju pendekatan terintegrasi, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan penghidupan masyarakat adat secara holistik. Sehingga kebaruan terletak pada intensitas dan pola pendampingan memperkuat struktur dan proses yang mengikat modal di dalam model SLF. Sedangkan secara empiris kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif antara Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo yang memperkuat validitas model pemberdayaan melalui identifikasi variasi empiris dalam pemanfaatan aset penghidupan dan pendampingan yang lebih baik.

Secara operasional model yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam merancang intervensi pemberdayaan masyarakat adat melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) identifikasi ketimpangan antar aset penghidupan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi; (2) penguatan aset penghidupan secara terintegrasi, seimbang dan bukan parsial; dan (3) peningkatan kualitas pendampingan sebagai mekanisme kunci dalam mentransformasikan aset menjadi strategi penghidupan yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga memberikan kerangka operasional bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

